

ANALISIS GAMBARAN UMUM BARANG PUBLIK DI KABUPATEN SUBANG TAHUN 2024

Dicki Rizki Azhari

Magister Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni, 2025

Revised Juni, 2025

Accepted Juni, 2025

Available online Juni, 2025

dicki15001@mail.unpad.ac.id

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gambaran umum barang publik di Kabupaten Subang pada tahun 2024, mencakup aspek ketersediaan, pemanfaatan, dan pengelolaan. Barang publik merupakan sarana penting dalam mendukung pelayanan masyarakat, pembangunan daerah, dan pemerataan kesejahteraan. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan wawancara dengan pihak terkait, seperti pemerintah daerah dan masyarakat pengguna. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat beberapa barang publik yang mengalami perbaikan signifikan dalam hal kualitas dan aksesibilitas, namun masih ditemukan kendala dalam hal distribusi, pemeliharaan, dan optimalisasi penggunaannya. Temuan ini memberikan rekomendasi strategis bagi pengelolaan barang publik agar lebih efisien dan merata ke seluruh wilayah Kabupaten Subang.

Kata Kunci: Barang publik, Kabupaten Subang, Pengelolaan Aset, Pelayanan Publik, Analisis Deskriptif

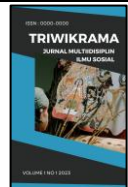
PENDAHULUAN

Pemerintahan merupakan tata kelola penggerak arah dan kebijakan demi tercapainya kehidupan. Dalam dinamika yang terus berubah, peran pemerintah sangat penting untuk menjaga kestabilan, membangun kemajuan, dan merespons kebutuhan rakyat di berbagai bidang kehidupan. Secara umum, pengertian pemerintahan merupakan proses atau cara pemerintah dalam menjalankan wewenangannya di berbagai bidang (ekonomi, politik, administrasi, dan lain-lain) dalam rangka mengelola berbagai urusan negara untuk kesejahteraan masyarakat. (Noviardi, 2024).

Dalam pemerintahan, fenomena tata kelola merupakan suatu hal yang kompleks dan memiliki beragam interpretasi diberbagai bidang. Salah satunya yaitu layanan yang disediakan oleh pemerintah. Layanan publik dikategorikan sebagai salah satu aspek fundamental dalam sistem pemerintahan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, dan keamanan, serta memberikan pelayanan yang adil dan efisien. (Fikri et al, 2025).

Layanan Publik dapat berupa barang yang disediakan oleh negara untuk dinikmati oleh seluruh masyarakat disebut barang publik. Barang publik memiliki dua ciri: tidak bersaing, yang berarti bahwa konsumsi oleh satu orang tidak mengurangi ketersediaan untuk orang lain, dan non-excludable, yang berarti bahwa tidak ada pihak yang dapat dilarang menggunakannya. Fasilitas publik di Indonesia termasuk jalan raya, taman, sekolah dasar, dan layanan kesehatan. Barang publik difokuskan hadir untuk menjamin kesejahteraan umum dan keadilan sosial. (kompasiana.com, 2024).

Di Indonesia, meskipun pelayanan publik menjadi salah satu fokus utama dalam agenda pembangunan nasional, sering kali masyarakat menghadapi ketidakpuasan terkait kualitas pelayanan yang diberikan. Salah satu faktor penyebab utama adalah adanya kesenjangan antara harapan masyarakat yang menginginkan pelayanan yang cepat, mudah, berkualitas, dan



transparan dengan kenyataan yang dihadapi di lapangan. Proses birokrasi yang rumit, kurangnya sumber daya manusia yang terlatih, ketidaktransparanan dalam prosedur, serta keterbatasan anggaran dan infrastruktur menjadi tantangan besar dalam mewujudkan pelayanan publik yang optimal. (Baharudin et al, 2025).

Berdasarkan tinjauan uraian fenomena tersebut, maka penulis bertujuan untuk menganalisis bagaimana gambaran umum terkait barang publik di Kabupaten Subang selama Tahun 2024. Sebagaimana mestinya bahwa, Pemerintahan Kabupaten Subang menjalankan berbagai fungsi inti untuk melayani masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan daerah yang diharapkan oleh masyarakat. Dengan adanya Gambaran Barang Publik ini diharapkan pula dapat menjadi wawasan dan transparansi Pemerintah Daerah Kabupaten Subang

TINJAUAN PUSTAKA

Pelayanan publik merupakan jantung dari fungsi pemerintahan modern yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan hak-hak dasar warga negara.

“Layanan Publik merupakan instrumen negara dalam menjamin hak-hak dasar warga negara atas barang dan jasa yang berkaitan langsung dengan kehidupan sosial, ekonomi, dan administratif.” (Rachman, 2021 dalam Sri et al, 2025).

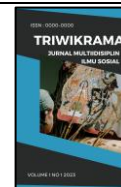
Layanan Publik juga merupakan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berdasarkan asas kepastian, akuntabilitas, dan kesetaraan. layanan publik idealnya tidak hanya efisien secara administratif, tetapi juga mengandung nilai-nilai etika, transparansi, dan kepedulian terhadap kebutuhan warga negara. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 secara tegas menyatakan bahwa pelayanan publik harus menjamin kepastian hukum, kejelasan prosedur, waktu, biaya, serta hak untuk memperoleh layanan yang adil. Dimensi pelayanan publik mencakup tiga elemen utama: pelayanan administratif, pelayanan barang publik, dan pelayanan jasa sosial. Sri et al, 2025).

Barang Publik

Pemerintah menjalankan tiga peran penting dalam kegiatan ekonomi, yaitu sebagai pengalokasi, pendistribusi, dan penstabil. Salah satu peran utamanya adalah fungsi alokasi, yaitu bagaimana pemerintah menggunakan sumber daya yang ada untuk menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat secara merata. Barang dan jasa ini umumnya tidak bisa disediakan secara efisien oleh pasar bebas, karena bersifat untuk kepentingan umum dan tidak mengutamakan keuntungan. Oleh karena itu, campur tangan pemerintah menjadi sangat penting agar semua lapisan masyarakat bisa mengakses layanan tersebut secara adil dan merata.

“Barang publik adalah barang atau jasa yang dikonsumsi oleh satu individu tidak mengurangi ketersediaannya bagi individu lain, dan tidak ada orang yang dapat jatuh dari kegunaannya . Barang publik memiliki dua ciri utama, yaitu non-rivalry (tidak saling bersaing dalam konsumsi) dan non-excludability (tidak dapat memfasilitasi orang dari penggunaannya)”.(A. Musgrave, 1959 dalam Sarah et al, 2024).

Kinerja Penyediaan Barang Publik Pemerintah Daerah dapat menyediakan barang publik secara efisien namun penyediaan barang publik menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks. Beberapa individu di masyarakat menikmati manfaat barang publik tanpa berkontribusi pada pembiayaannya, yang dapat menghambat penyediaan barang tersebut secara optimal. Selain itu, sulit untuk mengukur preferensi publik karena masyarakat memiliki kebutuhan dan keinginan yang beragam. Keterbatasan anggaran negara juga menjadi kendala, karena sumber daya yang tersedia sering kali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan publik secara menyeluruh. Kegagalan sistem birokrasi, seperti inefisiensi dan korupsi, juga dapat menghambat pengelolaan dan distribusi barang publik.



Dasar Hukum

Perpres No. 16 Tahun 2018 jo. Perpres No. 12 Tahun 2021

Merupakan dasar hukum utama dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan proses pengadaan berjalan secara efisien, transparan, adil, dan akuntabel guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Pengadaan dilakukan dengan mengedepankan prinsip persaingan sehat, penggunaan produk dalam negeri, serta peningkatan peran pelaku usaha kecil, koperasi, dan UMK. Dalam pelaksanaannya, pengadaan harus memanfaatkan sistem elektronik (SPSE) dan didukung oleh LPSE, serta didorong melalui platform digital seperti e-Katalog dan SIRUP. Pelaku pengadaan terdiri dari berbagai unsur, seperti PA/KPA, PPK, Pokja Pemilihan, Pejabat Pengadaan, serta penyedia barang/jasa. Terdapat beberapa metode pengadaan yang dapat digunakan, antara lain tender, seleksi, pengadaan langsung, dan e-purchasing. Dengan regulasi ini, pemerintah berupaya menciptakan sistem pengadaan yang lebih terbuka, profesional, dan mendukung kemajuan ekonomi nasional

METODE

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif-deskriptif. Penelitian kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang berfokus pada pengamatan fenomena atau gejala yang terjadi secara alami (Abdussamad, 2021). Penelitian kualitatif berlandaskan naturalis dan bersumber pada pengamatan lingkungan. Salah satu jenis penelitian kualitatif adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian kualitatif yang mendeskripsikan makna dari data atau fenomena yang diamati oleh peneliti dan disertai dengan penyajian bukti-bukti yang mendukung. Pemahaman terhadap fenomena tersebut sangat dipengaruhi oleh keahlian dan ketelitian peneliti dalam melakukan analisis. Peneliti berupaya semaksimal mungkin untuk mereduksi dan memurnikan sehingga diperoleh makna fenomena yang sesungguhnya (Nasution, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Letak Geografis Kabupaten Subang

Koordinat:

Antara 6° 11' - 6° 49' Lintang Selatan dan 107° 31' - 107° 54' Bujur Timur

Batas Wilayah:

- Utara: Laut Jawa
- Timur: Kabupaten Indramayu
- Selatan: Kabupaten Sumedang & Bandung Barat
- Barat: Kabupaten Purwakarta & Karawang

Luas Wilayah:

± 2.051 km²

B. Analisis Gambaran Umum Barang Publik di Kabupaten Subang Tahun 2024

Tata Kelola Pengadaan Barang Publik

Indikator	Nilai	Kategori
Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	82,14	Baik
Pusat Pemantauan Pencegahan (MCP) KPK	78,93	-
Tingkat Kematangan Organisasi UKPBJ	Tingkat 3	Proaktif
Realisasi Produk Dalam Negeri (PDN)	96,20%	Dari Komitmen Belanja Pengadaan

(BPS Kab. Subang 2024)

Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Kabupaten Subang mencapai 82,14, yang menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan integritas dalam pengadaan telah diterapkan dengan baik, sejalan dengan prinsip good governance. Nilai 78,93 pada indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK menunjukkan upaya signifikan dalam pencegahan korupsi, meskipun tidak dikategorikan secara eksplisit. Tingkat kematangan organisasi UKPBJ telah mencapai Tingkat 3, yang berarti "Proaktif", mencerminkan kemampuan institusi dalam mengantisipasi kebutuhan pengadaan dan memperkuat kapasitas sumber daya manusia. Capaian penting lainnya adalah realisasi penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) sebesar 96,20%, menunjukkan komitmen terhadap kemandirian industri nasional dan dukungan terhadap UMKM. Secara keseluruhan, tata kelola pengadaan barang publik menunjukkan standar tinggi, dengan pencapaian efisiensi anggaran dan penguatan ekonomi nasional. Namun, masih ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kematangan organisasi.

Infrastruktur Kesehatan

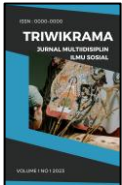
Jenis Fasilitas Kesehatan	Jumlah
Rumah Sakit Umum	10
Rumah Sakit Khusus	1
Puskesmas Rawat Inap	25
Puskesmas Non Rawat Inap	15
Klinik Pratama	113
Posyandu	1925

(BPS Kab. Subang 2024)

Data infrastruktur kesehatan Kabupaten Subang menunjukkan layanan kesehatan yang cukup merata, dengan fokus pada layanan dasar seperti Posyandu dan Klinik Pratama. Terdapat 10 Rumah Sakit Umum dan 1 Rumah Sakit Khusus yang melayani kebutuhan rujukan, meskipun distribusi dan aksesibilitas antar wilayah perlu ditingkatkan. Dengan 40 Puskesmas (25 rawat inap dan 15 non rawat inap), layanan kesehatan tingkat pertama diperkuat, terutama di daerah terpencil. Klinik Pratama berjumlah 113 unit, menunjukkan partisipasi sektor swasta dalam mendukung layanan kesehatan awal. Posyandu, yang berjumlah 1925, menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak, dengan fokus pada imunisasi dan pemantauan gizi. Secara keseluruhan, Kabupaten Subang memiliki sistem layanan kesehatan yang terintegrasi dari tingkat komunitas hingga rumah sakit. Namun, tantangan ke depan meliputi pemerataan geografis, peningkatan kualitas tenaga medis, dan integrasi layanan digital untuk efisiensi. Penguatan koordinasi antara fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta juga diperlukan untuk menciptakan sistem yang holistik dan berkelanjutan.

Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Jenis Infrastruktur	Lokasi	Status Pembangunan	Manfaat
Jembatan	Penghubung Desa Bantarsari dengan Desa Sukahurip, Kecamatan Cijambe	Progres sampai pemasangan beton	Memaksimalkan distribusi hasil pertanian, kebun, dan hutan
Jalan	Penghubung Kelurahan Dangdeur dengan Desa Gambarsari, Kecamatan Pagaden Barat	Dalam proses pengerjaan	Meningkatkan akses transportasi antar desa



Jenis Infrastruktur	Lokasi	Status Pembangunan	Manfaat
Perbaikan Jalan	Desa Rawamekar, Kecamatan Blanakan	Tahap penambalan di beberapa titik kerusakan	Memperbaiki akses transportasi

(BPS Kab. Subang 2024)

Data menunjukkan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Subang, yang berdampak positif pada perekonomian lokal dan mobilitas masyarakat.

- Jembatan Bantarsari-Sukahurip (Kecamatan Cijambe): Pembangunan jembatan ini hampir selesai dengan progres pemasangan beton. Jembatan ini akan mempermudah distribusi hasil pertanian dan sumber daya alam antara kedua desa, mengurangi biaya transportasi, dan meningkatkan kesejahteraan petani.
- Jalan Penghubung Dangdeur-Gambarsari (Kecamatan Pagaden Barat): Pembangunan jalan ini masih berlangsung, bertujuan untuk meningkatkan akses transportasi antar desa. Jalan yang lebih baik akan mempercepat distribusi barang dan mendukung pengembangan ekonomi, terutama di sektor perdagangan dan pariwisata.
- Perbaikan Jalan di Rawamekar (Kecamatan Blanakan): Proses penambalan kerusakan jalan telah dimulai, yang meningkatkan kenyamanan dan keamanan berkendara. Perbaikan ini juga memfasilitasi akses ke pusat-pusat ekonomi dan layanan publik seperti puskesmas, sekolah, dan pasar.

Infrasrtuktur Fasilitas Umum Alun-Aalun Subang

Daerah	Fasilitas yang tersedia	Fungsi
Wilayah Utara	Toilet	Fasilitas sanitasi
	Taman Skate	Rekreasi dan olahraga
	Kios Kuliner	Ekonomi dan wisata kuliner
	Taman Air Mancur	Estetika dan Rekreasi
	Area Parkir	Fasilitas penunjang
Area Depan Air Mancur	Senam Daerah	Aktivitas olahraga masyarakat
	Taman Bermain	Rekreasi anak-anak
Area Utara	Lintasan Jalan	Khusus untuk pejalan kaki
	Lintasan Lari	Khusus untuk aktivitas jogging

(BPS Kab. Subang 2024)

Alun-Alun Subang dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum yang mendukung aktivitas sosial, rekreasi, dan ekonomi. Di wilayah utara, terdapat toilet untuk sanitasi, taman skate untuk olahraga, kios kuliner yang menawarkan pilihan makanan, taman air mancur yang menambah estetika, dan area parkir untuk aksesibilitas. Selain itu, area depan air mancur menyediakan ruang untuk senam daerah dan taman bermain bagi anak-anak, menciptakan suasana yang aktif dan ramah keluarga.

Di area utara, lintasan jalan dan lintasan lari memberikan ruang aman bagi pejalan kaki dan pelari, mendorong gaya hidup sehat. Fasilitas-fasilitas ini tidak hanya meningkatkan kualitas

hidup masyarakat, tetapi juga menciptakan ruang publik yang inklusif. Untuk menjaga efektivitas dan kenyamanan, penting untuk terus memantau dan merawat fasilitas yang ada, serta mempertimbangkan penambahan fasilitas baru sesuai kebutuhan masyarakat.

Infrastruktur Jalan Kabupaten Subang

Infrastruktur Jalan Kabupaten Subang	Panjang (km)	Kondisi/Catatan
Jalan Nasional	46	
Jalan Provinsi	168	89.85% dalam kondisi baik
Jalan Kabupaten/Kota	1.164	195.99 km rusak berat (data Maret 2025)

(BPS Kab. Subang 2024)

Data infrastruktur jalan di Kabupaten Subang menunjukkan variasi kondisi yang memengaruhi mobilitas dan ekonomi masyarakat. Jalan nasional sepanjang 46 km berperan penting dalam menghubungkan Subang dengan kota-kota besar, dan diharapkan kondisinya terjaga dengan baik untuk mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, dari total 168 km jalan provinsi, sekitar 89,85% berada dalam kondisi baik, yang memfasilitasi transportasi dan perdagangan antar kabupaten. Namun, pemeliharaan tetap diperlukan untuk menjaga kualitas jalan.

Di sisi lain, jalan kabupaten/kota yang memiliki panjang total 1.164 km menghadapi tantangan serius, dengan 195,99 km dalam kondisi rusak berat. Kerusakan ini dapat menghambat mobilitas, memperburuk aksesibilitas, dan meningkatkan biaya transportasi, serta berpotensi menyebabkan kecelakaan. Oleh karena itu, perbaikan jalan yang rusak berat harus menjadi prioritas, terutama di daerah yang mendukung kegiatan ekonomi seperti pasar dan pusat distribusi.

Infrastruktur Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jenis Sekolah	Ketersediaan
SD	Negeri & Swasta	Tersedia per Kecamatan
SMP	Negeri & Swasta	Tersedia per Kecamatan
SMA	Negeri & Swasta	Tersedia per Kecamatan

(BPS Kab. Subang 2024)

Data infrastruktur pendidikan di Kabupaten Subang menunjukkan ketersediaan pendidikan yang merata di seluruh wilayah, mencakup Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Setiap kecamatan memiliki akses ke SD negeri dan swasta, mencerminkan peran pemerintah dan sektor swasta dalam menyediakan pendidikan dasar. Ketersediaan SMP juga merata di setiap kecamatan, memastikan anak-anak dapat melanjutkan pendidikan setelah lulus SD. Meskipun jumlah SMA lebih terbatas, keberadaannya di setiap kecamatan penting untuk memberikan peluang pendidikan lanjutan bagi pelajar. Hal ini mengurangi hambatan geografis dan mempersiapkan generasi muda untuk siap bekerja di berbagai sektor.

SIMPULAN

1. Infrastruktur Pendidikan yang Merata: Kabupaten Subang memiliki ketersediaan pendidikan yang merata dari tingkat SD hingga SMA di setiap kecamatan. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah dan sektor swasta dalam menyediakan akses pendidikan yang layak untuk semua



- anak. Tantangan ke depan adalah memastikan kualitas pendidikan dan pemerataan fasilitas di daerah terpencil.
2. Pembangunan Infrastruktur yang Mendukung Ekonomi dan Mobilitas: Proyek pembangunan jalan dan jembatan, seperti Bantarsari-Sukahurip dan perbaikan jalan di Rawamekar, akan meningkatkan distribusi hasil pertanian, mempercepat mobilitas antar desa, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, perhatian lebih diperlukan untuk memperbaiki jalan yang rusak berat di jalan kabupaten/kota agar konektivitas tetap optimal.
 3. Peningkatan Kualitas dan Kesehatan Masyarakat: Infrastruktur kesehatan di Kabupaten Subang cukup baik dengan adanya rumah sakit, puskesmas, klinik pratama, dan posyandu. Namun, tantangan yang masih ada meliputi pemerataan akses fasilitas kesehatan, penguatan kapasitas tenaga medis, dan peningkatan kualitas layanan kesehatan, terutama di daerah terpencil.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Kabupaten Subang. (2024). Kecamatan Subang Dalam Angka 2024.
- Cahyani, AW (2024, 10). Barang publik di Indonesia: Memiliki tapi tidak bisa menggapai . Kompasiana. Diakses dari <https://www.kompasiana.com/anisawulanchahyani5100/663d2452c57afb330a302202/barang-publik-di-indonesia-memiliki-tapi-tidak-bisa-menggapai>
- Fikri, M. A. R., & Tjenreng, M. B. Z. (2025). Manajemen Pelayanan Publik. Jurnal PKM Manajemen Bisnis, 5(1), 291-304.
- Noviardi, S. A. (2024). JELASKAN PENGERTIAN DAN BENTUK-BENTUK PEMERINTAHAN.
- Nugroho, H. S. (2019). MENALAR DILEMA AKTOR DAN MODEL KERJASAMA DALAM KERJASAMA PEMERINTAH-SWASTA. Jurnal Agregasi, 7(1), 1-110.
- Mozin, S. Y., Arkani, S., & Labasir, S. N. (2025). Pelayanan Publik dalam Perspektif Administrasi: Prinsip Kategori Barang, dan Jenis Layanan. Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 4(2), 198-207
- Bakara, S., Wulandari, M., Lubis, E. H., Nasution, A. R., Maulana, J., Rahmi, S. N., & Simanungkalit, J. (2024). Analisis Peran Pemerintah Dalam Ketersediaan Barang Publik. J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah, 4(1).
- Wicaksono, K. W. (2012). BARANG PUBLIK DAN EKSTERNALITAS PADA ERA OTONOMI DAERAH (PUBLIC GOODS AND THE ERA OF REGIONAL AUTONOMY EXTERNALITIES).